



# WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
PADA DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
12. Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.

4. Dinas adalah Perikanan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah serta digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Dinas Perikanan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Dinas Perikanan Kota Palangka Raya memiliki klasifikasi kelas A dengan beban kerja yang besar.

## BAB IV KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengembangan/pembenihan/Pembibitan, budidaya ternak ikan air tawar;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan standar kompetensi pengelolaan sumberdaya budidaya ikan air tawar;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya budidaya ikan air tawar;
- e. menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang bermutu; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Ikan Air Tawar Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar;
- d. pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## BAB VI URAIAN TUGAS

### Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar;
  - b. mengkoordinasikan dan mengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar;
  - c. merencanakan kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar;
  - d. memberikan arahan, pembinaan pada jajaran petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar;
  - e. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

- f. memberikan saran dan bahan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas pengembangan/peningkatan produktivitas daerah sesuai dengan tugas permasalahannya sebagai bahan pimpinan dalam menjalankan kebijakan;
  - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Kepala Dinas; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyeleggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi:
- a. merumuskan rencana teknis operasional pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air tawar;
  - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan pelayanan teknik ikan air tawar;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknik operasional produksi dan pelayanan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/penyakit/pakan/residu;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana serta kearsipan UPTD;
  - e. melaksanakan kerjasama/koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan teknik operasional produksi dan pelayanan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelayanan laboratorium pengujian kualitas air/peyakit/pakan/residu;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi keuangan sumber daya manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. menyelia tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
  - d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
  - e. menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sub bagian tata usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
  - f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai fungsi:
  - a. mengelola urusan umum;
  - b. mengelola urusan keuangan;
  - c. mengelola urusan perlengkapan; dan
  - d. mengelola urusan rumah tangga.



Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Air Ikan Air Tawar terdiri dari :
  - a. penyuluh perikanan;
  - b. pengendali hama dan penyakit ikan; dan
  - c. pengawas perikanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi :
  - a. melaksanakan penyuluhan perikanan;
  - b. melaksanakan pengendali hama dan penyakit ikan; dan
  - c. melaksanakan pengawasan perikanan.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Air Ikan Air Tawar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dan UPTD disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang urusan pemerintahan membidangi yang diatur sesuai Peraturan Menteri di bidang urusan pemerintahan membidangi.

Bagian Kedua  
Eselon

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar diangkat dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Februari 2019

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,**



**ROSIKINNOR**

**BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 4**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR       TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN  
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KOTA  
PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA UPT

KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA

---

KELOMPOK JABATAN  
PELAKSANA DAN  
JABATAN  
FUNGSIONAL

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**